



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 Juni 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI C. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, hari Senin, 6 Juni 2022, dibuka pukul 14.42 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dengan agenda pembicaraan

pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) sebesar **Rp15.987.872.001.000,-** (*lima belas trilyun sembilan ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah*), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.
2. Ketua KPU RI mengajukan usulan anggaran, yaitu:
 - a. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2023 sebesar **Rp7.869.445.225.000,-** (*tujuh trilyun delapan ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 - b. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp5.608.119.929.000,-** (*lima trilyun enam ratus delapan milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
3. Ketua KPU RI menyampaikan hasil realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 KPU RI sebesar Rp760.200.236.534, dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.329.543.182.000,- atau sebesar 32.63%.
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) sebesar **Rp7.103.821.817.000,-** (*tujuh trilyun seratus tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.
5. Ketua Bawaslu RI mengajukan usulan anggaran, yaitu:
 - a. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2023 sebesar **Rp6.069.464.311.000,-** (*enam trilyun enam puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*).
 - b. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp1.718.399.533.000,-** (*satu trilyun tujuh ratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
6. Ketua Bawaslu RI menyampaikan hasil realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 Bawaslu RI sebesar

Rp607.175.670.474,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.982.860.804.000,- atau sebesar 30.62%.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) sebesar **Rp15.987.872.001.000,-** (*lima belas trilyun sembilan ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah*), dan akan mem bahas nya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.
2. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU RI:
 - a. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2023 sebesar **Rp7.869.445.225.000,-** (*tujuh trilyun delapan ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp5.608.119.929.000,-** (*lima trilyun enam ratus delapan milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);Komisi II DPR RI akan membahas secara mendalam kedua poin tersebut pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.
3. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2022 KPU RI sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp760.200.236.534,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.329.543.182.000,- atau sebesar 32.63%.
4. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) sebesar **Rp7.103.821.817.000,-** (*tujuh trilyun seratus tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*), dan akan mem bahas nya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.

5. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI:
 - a. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2023 sebesar **Rp6.069.464.311.000,-** (*enam trilyun enam puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*);
 - b. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp1.718.399.533.000,-** (*satu trilyun tujuh ratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);

Komisi II DPR RI akan membahas secara mendalam kedua poin tersebut pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.

6. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2022 Bawaslu RI sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp607.175.670.474,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.982.860.804.000,- atau sebesar 30.62%.
7. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga), serta alokasi anggaran pemilu serentak tahun 2019 beserta realisasinya kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat **Jum'at, 10 Juni 2022**, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.40 WIB.

Jakarta, 6 Juni 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNGA

A-270